

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI TAKALAR**

Diajukan Oleh
A.NURFAHMI AULIAH
45 14 013 076



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar.**
2. Nama Mahasiswa : A. Nurfahmi Auliah
3. Nomor Stambuk : 45 014 013 076
4. Fakultas : EKONOMI
5. Program Studi : AKUNTANSI
6. Tempat Penelitian : UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda
7. Lama Penelitian : 2 Bulan

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE.,MM.,M.Kes.


H. Muh. Idris, SE.,M.Si.

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi


Dr. H.A. Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH,MH


Dr. Firman Manne, SE.,M.Si.,AK.,CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Nurfahmi Auliah

Nim : 4514013076

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Takalar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 30 Juli 2018

Penulis

A. Nurfahmi Auliah

**The Effect of Motor Vehicle Tax and Cost of Vehicle to the Regional Income of the Takalar
By:**

A. Nurfahmi Auliah

**Accounting Study Program Faculty of Economics,
University of Bosowa**

ABSTRACT

A. Nurfahmi Auliah.2018.Skripsi. The Effect of Motor Vehicle Tax and Cost of Vehicle to the Regional Income of the Takalar guided by Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M. Kes and H. Muh. Idris, SE.,M.Si. The purpose of this study is to determine effect of Motor Vehicle Tax, Cost Of Vehicle on Regional Income in Takalar.

The data used are secondary data that uses time series from 2014 to 2017, using library research and documentation method done at UPT Revenue Takalar Region Bapenda South Sulawesi Province. Data analysis used in this research is multiple linear regression analysis.

The results of this study based on statistical calculations with SPSS 21 shows that Motor Vehicle Tax effect on regional income in Takalar with significant value of $0,019 < 0,05$ and value t count $33,219 > t$ table 12,7, cost of vehicle no effect on regional income in Takalar with significant value of $0,109 > 0,05$ and value t count $5,796 < t$ table 12,7 because most vehicle owners who have used sale and purchase transactions of used vehicles don't change the transfer fee, and simultaneously the Motor Vehicle Tax and the cost of vehicle effect on regional income in Takalar with significant value of $0,026 < 0,05$ and value F count $749,297 > F$ table 19,0.

Keywords: Motor vehicle tax and cost of vehicle, Regional Income

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar

Oleh :

A. Nurfahmi Auliah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

A. Nurfahmi Auliah.2018.Skripsi.Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE.,MM.,M.Kes dan H. Muh. Idris, SE.,M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan waktu periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dengan menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan di UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS 21 menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Takalar dengan nilai signifikan sebesar $0,019 < 0,05$ dan nilai t hitung $33,219 > t$ tabel $12,7$, bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Takalar dengan nilai signifikan sebesar $0,109 > 0,05$ dan nilai t hitung $5,796 < t$ tabel $12,7$ dikarenakan sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual-beli kendaraan bekas tidak mengganti bea balik namanya, dan secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Takalar dengan nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,05$ dan nilai F hitung $749,297 > F$ tabel $19,0$.

Kata Kunci : Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pendapatan asli daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih sayang, kemudahan dan segala anugerah-Nya yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fskultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Penulis banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsi pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH selaku dekan Fakulatas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi. Serta semua staf dan dosen-dosen fakultas ekonomi.
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes sebagai pembimbing I dan Bapak H. Muh. Idris, SE, M.Si, sebagai pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Bapak H. Sopyan, SH., MM sebagai Kepala UPT Pendapatan Wilayah Takalar beserta seluruh stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor beliau.
7. Ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudini, S.Sos sebagai staf di UPT Pendapatan Wilayah Takalar yang bersedia memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan material yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Buat adik ku tercinta terima kasih banyak atas doa, dorongan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman ku yang tercinta selusin squad (Lita, Fika, Nurul, Ani, Ica, Nelly, Indri, Aulia, Fate, Ayang, dan Muli) yang telah memberikan dorongan, semangat serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimah kasih buat lely, ulfah, dan anti yang setia mendengarkan keluh kesah ku selama penyusunan skripsi ini.
11. Terimah kasih juga buat kak Mading, kak Muin, dan Kak Dihan serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu atas dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, 30 Juli 2018

A.Nurfahmi Auliah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi	7
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	7
2.1.2.2 Pengertian Retribusi	8
2.1.3 Fungsi Pajak	10
2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	11

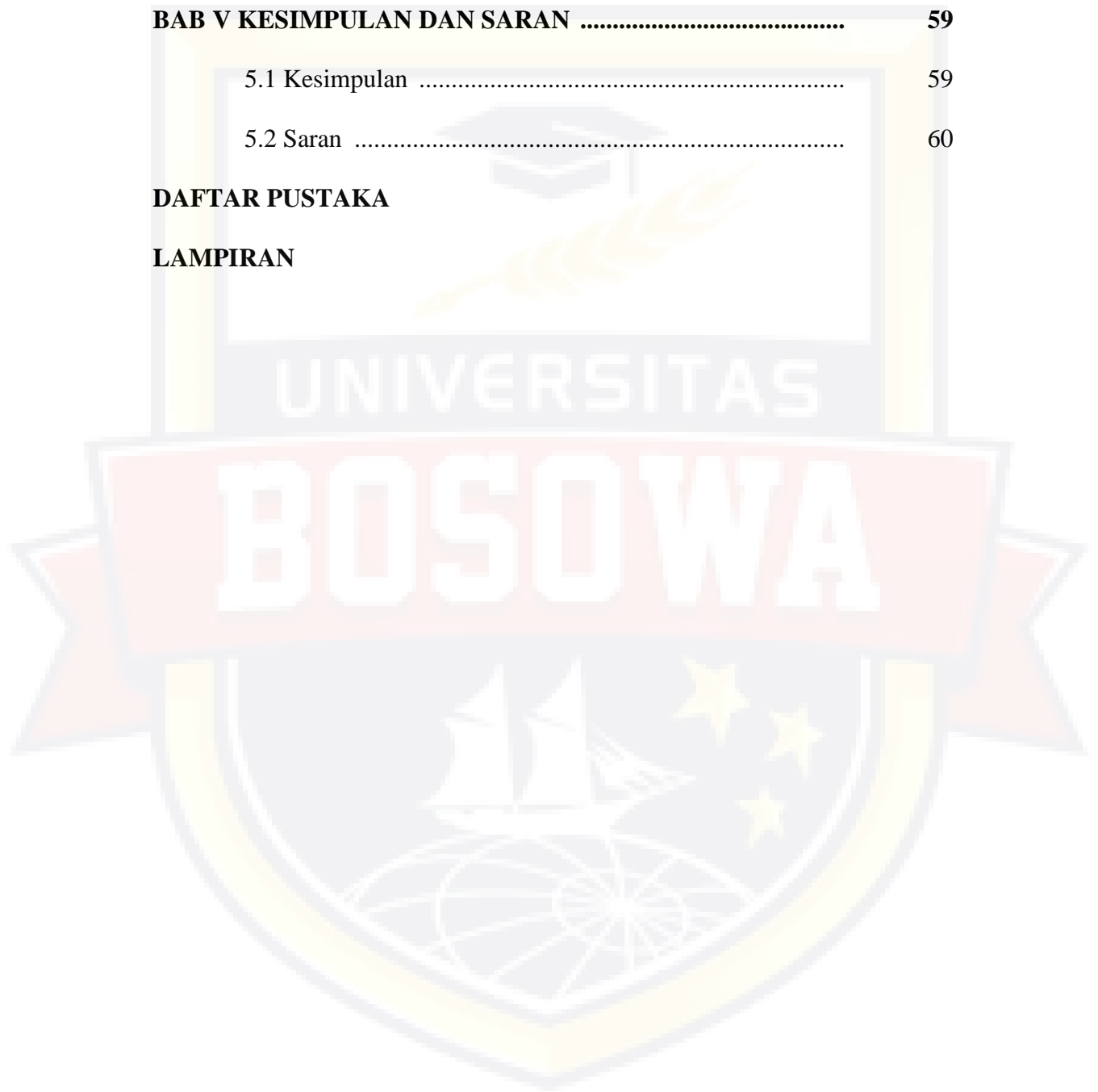
2.1.5 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.5.1 Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.5.2 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.6 Pengelompokan Pajak	14
2.1.7 Tarif Pajak	15
2.1.8 Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.1.9 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.1.10 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.1.11 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.12 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20
2.1.13 Objek BBN-KB	20
2.1.14 Subjek BBN-KB	21
2.1.15 Tarif BBN-KB	21
2.2.16 Pendapatan Asli Daerah	22
2.2 Kerangka Pikir	23
2.3 Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2. Metode Pengumpulan Data	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Metode Analisis Data	26
3.4.1 Regresi Linear Berganda	26
3.4.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	27

3.4.3 Uji Simultan (uji F)	27
3.4.4 Uji t	27
3.4.5 Uji Asumsi Klasik	28
3.4.5.1 Uji Normalitas	28
3.4.5.2 Uji Heteroskedasitas	28
3.4.5.3 Uji Autokorelasi	28
3.4.5.4 Uji Multikolinearitas	28
3.5 Definisi Operasional	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	30
4.1.2 Visi dan Misi	32
4.1.2.1 Visi	32
4.1.2.2 Misi	32
4.1.3 Struktur Organisasi	32
4.2 Deskriptif Data	43
4.2.1 Penerimaan PKB	43
4.2.2 Penerimaan BBNKB	46
4.2.3 Penerimaan PAD	48
4.3 Analisis Data	49
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	49
4.3.2 Uji Regresi Linear Berganda	54
4.3.3 Uji t	55

4.3.4 Uji F	56
4.3.5 Uji Koefisien R^2	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

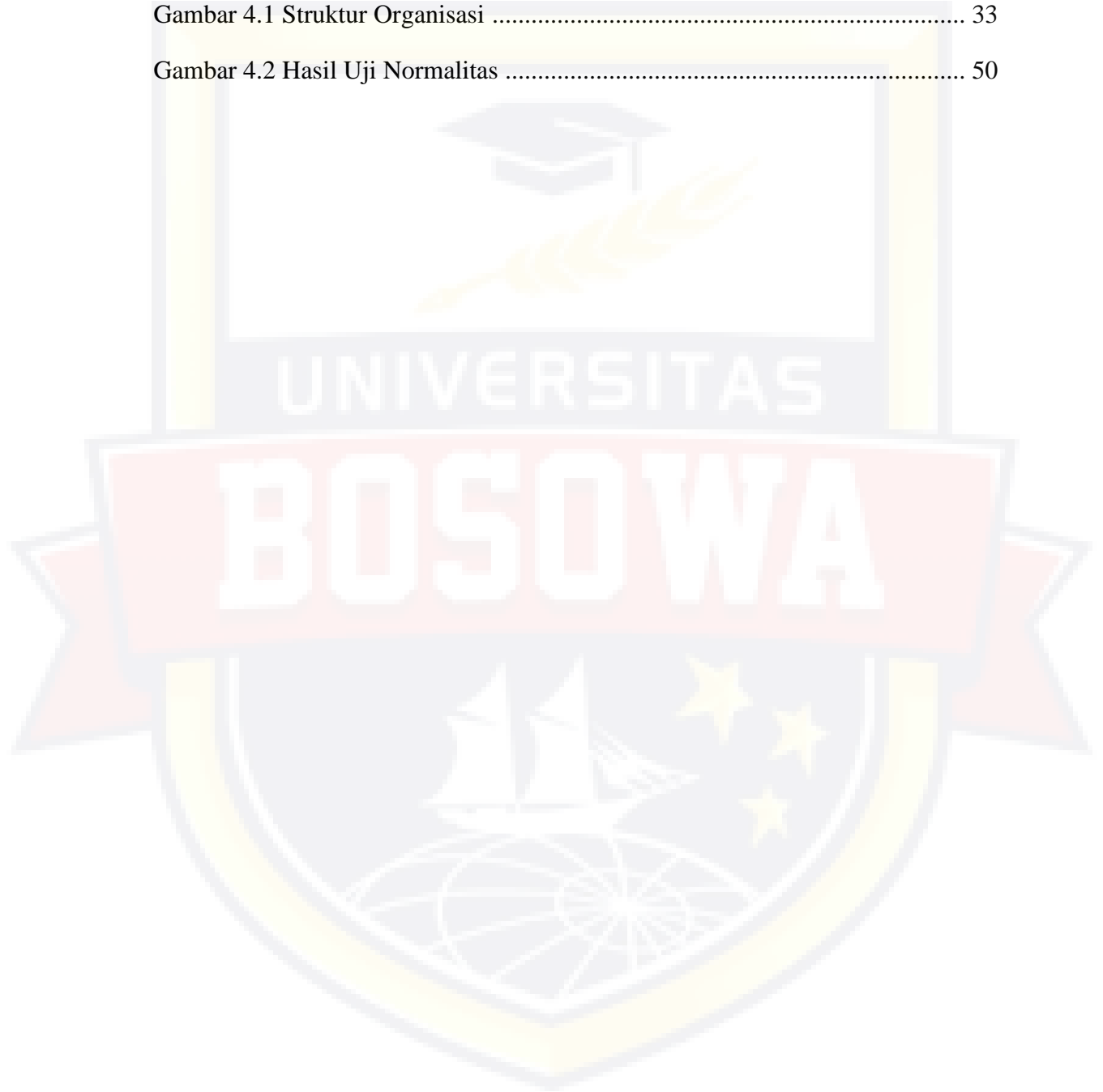
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	33
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan PKB dan BBN-KB	3
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Takalar	43
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB di Takalar	46
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD di Takalar	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisita	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.7 Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4.8 Uji F	57
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi R^2	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi. Pemerintah pusat sebagai lembaga ekonomi akan melakukan pengeluaran berbagai macam biaya untuk semua kegiatan operasional, maka pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut.

Indonesia sebagai Negara berkembang terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik yang berupa fisik maupun mental. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional. Pembangunan daerah adalah bagian dari kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintah di daerah.

Takalar merupakan salah satu daerah otonomi. Pemberian otonomi terhadap daerah dimaksud agar daerah lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang

dimiliki untuk digunakan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendaptan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim,2001:110).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

PAD menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri dalam upaya menciptakan kemandirian daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaanya harus dilakukan dengan baik, dalam hal ini dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien guna mencapai tujuan daerah yang maksimal.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti pajak

provinsi misalnya Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat.

Berikut data yang diperoleh dari UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan PKB dan BBN-KB di Takalar Tahun 2014-2017

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2014	Rp 13.788.294.152	Rp 19.992.967.125
2015	Rp 15.870.360.970	Rp 19.560.332.000
2016	Rp 18.198.767.320	Rp 21.109.563.000
2017	Rp 20.023.233.294	Rp 20.038.889.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi untuk penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Takalar diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB, tetapi kenyataannya hasil didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang, adanya kendaraan bermotor selundupan yang belum teregistrasi oleh Bapenda sebagai potensi pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Takalar?
2. Apakah bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Takalar?
3. Apakah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Takalar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.
2. Untuk mengetahui pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.

1.4 Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan Pajak Daerah dan dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dimasa akan datang dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berikut ini beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1995:2-6) dalam Anwar Pohan (2017:31) sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin Internasional *Bureau of Fiscal Documentation* di Amsterdam), definisi pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Menurut Mr. Dr. N. J. Fieldman dalam bukunya *De overheidmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949 (terjemahan):
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.
4. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, dalam bukunya *De Economische Betekenis der Balastingen*, 1951 (terjemahan):
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
5. Menurut Prof. Edwin R.A, Seligmen dalam bukunya *Essay in Taxation*:
“*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”.
(Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya).

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa imbalan yang langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2.1.2.2 Pengertian Retribusi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu:

1. Retribusi Jasa umum adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum yaitu:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan.
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

- 4) Retribusi Pemakaman Dan Pengabuan
 - 5) Retribusi Pelayanan Parker di Tepi Jalan Umum.
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - 9) Retribusi Pengelolaan Limbah
 - 10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - 11) Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Jenis retribusi usaha yaitu:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan.
 - 4) Retribusi Terminal.
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

10) Retribusi Penyebrangan di Air.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal empat macam fungsi pajak, yakni:

1. Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi Pajak *Regulerend* (Mengatur)

Suatu fungsi dimana dalam pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras yang akan menjadikan sangat mahal dengan maksud agar pembeli/konsumen minuman keras akan berkurang banyak sehingga dengan harga minuman keras yang sangat mahal tersebut minuman keras tidak bisa dijangkau dan tidak ada lagi generasi muda yang mabuk-mabukan.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan saran perpajakan untuk stabilitasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor akan dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, jalan kereta api, *Mass Rapid Transportation* (MRT). Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.

2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori berikut ini memberikan dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Anwar Pohan, 2017:42) adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Fungsi negara yang utama adalah melindungi individu, baik jiwa maupun harta miliknya negara berhak memungut pajak, karena itu yang merupakan beban utama bagi negara adalah terselenggaranya ketertiban hukum yang melindungi hukum dan sebagai imbalannya (kontra perstasi) individu diharuskan membayar premi sebagai pembayaran pajak.

2. Teori Kepentingan

Timbangan dasar pajak harus ditentukan sesuai besar kecilnya kepentingan yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka semakin besar pula perlindungan negara kepadanya.

3. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut teori ini, negara mengembang tugas melindungi segenap warganya maka timbulah hak mutlak (absolut) negara untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara.

4. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang.

5. Teori Gaya Beli

Pemungutan pajak hanya melihat kepada efeknya yang positif untuk kecukupan penerimaan negara buat membiayai pengeluaran umum negara, dan efek yang baik itulah sebagai dasar keadilannya.

6. Teori Pembangunan

Dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang memuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera.

2.1.5 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

2.1.5.1 Asas Pemungutan Pajak

Ada empat asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Sumber (*Source Rules*)

Suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan domisili wajib pajak.

2. Asas Tempat Tinggal (*Domicile Rules*)

Suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun berasal dari luar negeri.

3. Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan (*Nationality Rules*)

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara, dimanapun seorang warga negara berada dapat dikenakan pajak oleh fiskus negara asalnya.

4. Asas Teritorial (*Territorial*)

Suatu negara berwenang untuk mengenakan pajak hanya di dalam batas yuridiksi teritorialnya.

2.1.5.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.

3. *Withholding System*

Withholding system adalah suatu system pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut :

1. Menurut Lembaga Pemungutan

1) Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009.

2. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung adalah Pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.

3. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif adalah Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (Subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya.
- 2) Pajak Objektif adalah Pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya.

2.1.7 Tarif Pajak

Secara umum terdapat 4 tarif perpajakan yaitu:

1. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional atau Tarif Sebanding/sepadan, yaitu tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar pajak yang terutang.

2. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.

3. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif yang persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenai pajak.

2.1.8 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Saidi (2014:41) Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 UU PDRD adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

2.1.9 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Saidi (2014 : 80) telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakekatnya tidak dapat berpungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapaun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

2.1.10 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna terkandung dalam pengertian ini memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengewajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaanya

adalah wajib pajak kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor).

2.1.11 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 - 2) Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Sehubungan dengan tarif pajak kendaraan bermotor tersebut, diketahui bahwa tarif pajak yang dianut oleh pajak kendaraan bermotor bervariasi bergantung pada jenis kendaraan bermotor.

2.1.12 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian bea balik nama kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 14 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam arti bea balik nama kendaraan tergolong sebagai pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.1.13 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi, bea balik nama kendaraan bermotor memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Secara yuridis penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena, antara lain:

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Hibah
4. Hibah warisan
5. Waris

6. Hadiah
7. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan
8. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di Indonesia

Disamping adanya objek yang dapat dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor, terdapat pula penyerahan kendaraan bermotor yang tidak tergolong sebagai objek pajak.

2.1.14 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada BBNKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.1.15 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak daerah provinsi yang memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor menurut Pasal 12 ayat (1) UU PDRD diterapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 20% persen
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% persen

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor pada hakikatnya menganut tarif degresif (menurun). Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya mengecil bila dilakukan pada tahap penyerahan kedua dan seterusnya terhadap objek pajak yang bersangkutan. Sekalipun menganut tarif degresif, tidak berarti jumlah bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang menjadi kecil.

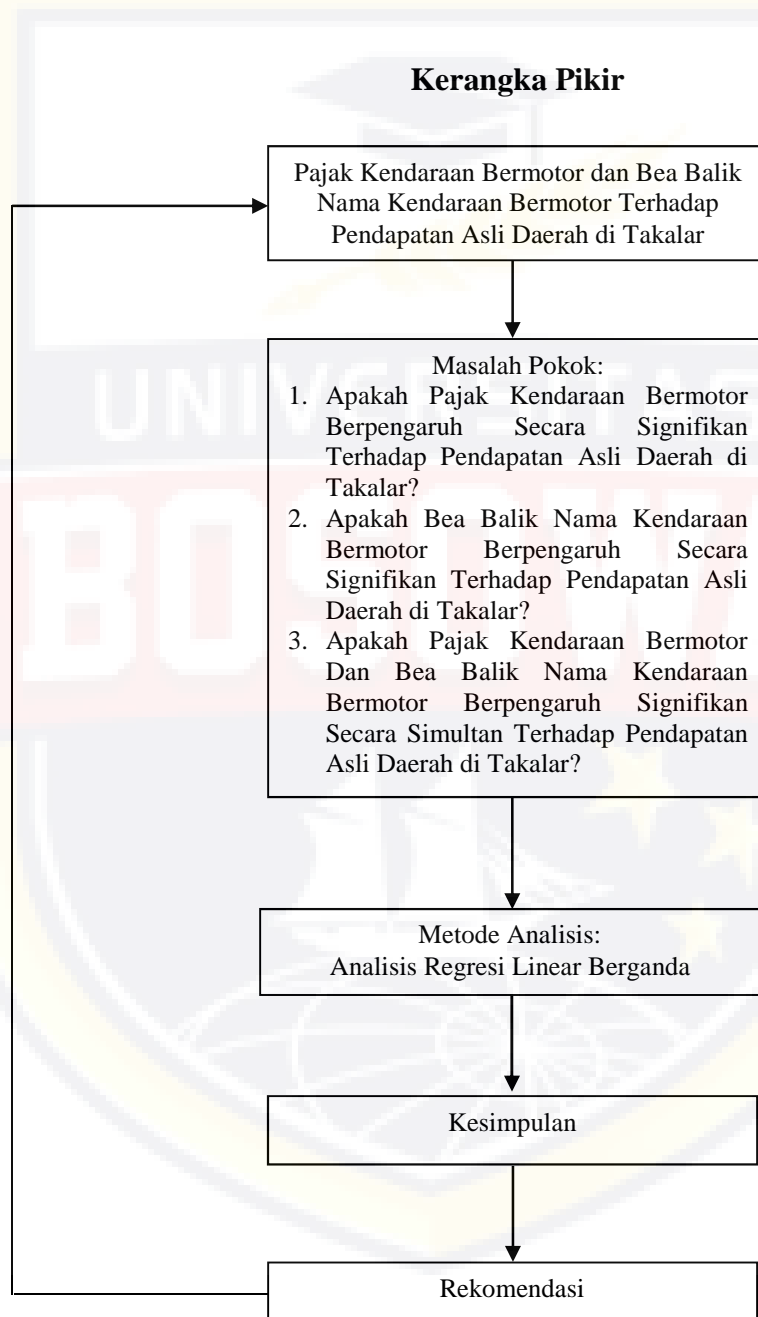
2.1.16 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari berikut ini:

1. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain.
2. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
3. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dan lain-lain.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan hipotesis bahwa:

1. H_1 : Diduga pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.
2. H_2 : Diduga bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.
3. H_3 : Diduga pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di takalar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar”, maka untuk memperoleh data, penelitian ini dilakukan di UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 251 Takalar.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur dan sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Bambang dan Nur Indriantoro, 2002 dalam buku Wiratna 2015). Dalam studi dokumentasi teknik pengumpulan tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui penelusuran dokumen-dokumen.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa bukti target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode 2014-2017.

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Regresi Linear Berganda

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linear, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS. (Ghozali, 2005 dalam buku Wiratna 2015). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pendapatan asli daerah

X₁ : Pajak kendaraan bermotor

X_2 : Bea balik nama kendaraan bermotor

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi

e : *Error*

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen.

3.4.3 Uji Simultan (uji F)

Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi di mana jika nilai signifikansi dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.4.4 Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. (Ghozali, 2005 dalam buku Wiratna 2015).

3.4.5 Uji Asumsi Klasik

3.4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

3.4.5.2 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas ialah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas.

3.4.5.3 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

3.4.5.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. (Ghozali, 2005 dalam buku Wiratna 2015).

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksud untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Definisi operasional untuk masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang besarnya diperoleh dengan menjumlahkan besaran pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya. Variabel independent atau bebas adalah kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan membandingkan besaran realisasi PKB dengan besaran realisasi PAD.

$$\text{Kontribusi PKB Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat adanya jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Variabel independent atau bebas adalah kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan membandingkan besaran realisasi BBN-KB dengan besaran realisasi PAD.

$$\text{Kontribusi BBN-KB Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBN-KB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi

Sulawesi Selatan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui penguatan *taxing power* yang dilakukan dengan mengimplemenatsikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat luasnya wilayah pengelolaan obyek pajak dan perkembangan jumlah kendaraan yang pesat di Provinsi Sulawesi Selatan, maka sejak 2008 dibentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok. Perpanjangan tangan pengelolaan pajak di daerah hanya dilayani 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis jumlah UPT bertambah menjadi 15 UPT dan hingga 2017 UPT telah hadir disemua kabupaten/kota, jumlahnya 25 Unit, 2 diantaranya terdapat di Kota Makassar.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada awalnya merupakan Samsat Pembantu UPTD Wilayah Gowa. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan dan Tata Cara Sekretariat Wilayah Daerah, maka Samsat Pembantu UPTD Wilayah Gowa yang ada di Kabupaten Takalar ditingkatkan menjadi UPTD Wilayah Takalar Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013.

Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang kotanya terletak di Pattallassang. Kabupaten Takalar terdiri dari Sembilan kecamatan yaitu, Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu, dan Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa.

Awal terbentuknya UPTD Wilayah Takalar Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPTD Wilayah Takalar dipimpin oleh Bapak Drs. Andi Wisma pada tahun 2013, namun sekitar akhir tahun 2013 digantikan oleh Ibu Luciana T. Saalino, M.Si yang mana beliau juga tidak lama dan digantikan oleh Bapak Drs. H. Zulkarnain Malik, M.Si pada akhir tahun 2014 sampai dengan Maret 2018. Pada bulan April 2018 Kepala UPT Pendapatan Wilayah Takalar dipimpin oleh Bapak H. Sopyan, SH, MM.

Berdasarkan Surat Keputusan Manteri Dalam Negeri No. 061/247/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi “Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi

“Maksimalnya peningkatan Pendapatan Daerah melalui pengelolaan Pendapatan Daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif”.

4.1.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% per tahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur pengelolaan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

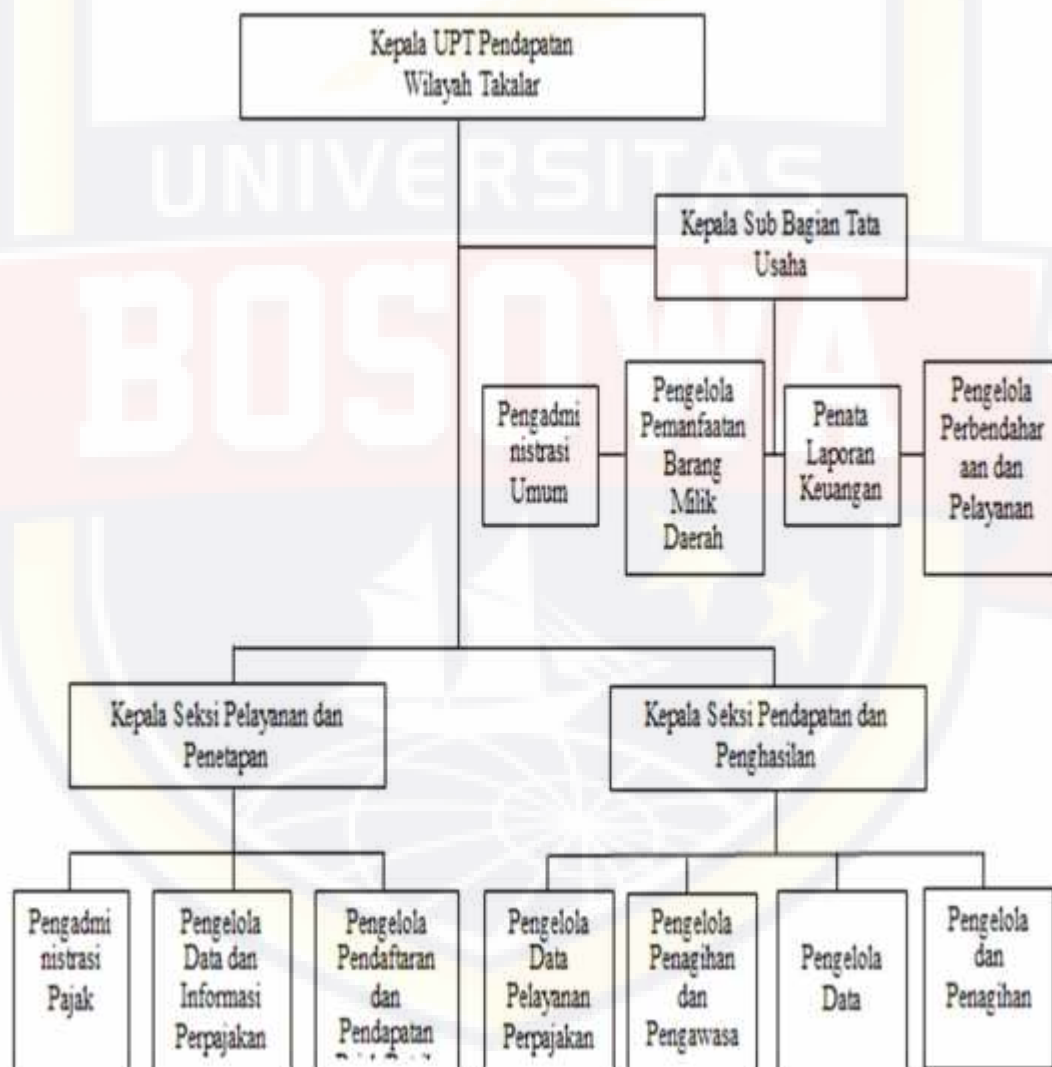
4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut ini struktur organisasi pada UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



Sumber: UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian tersebut adalah:

1. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Takalar

- 1) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- 4) Mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangi naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Melaksanakan kebijakan teknis pendapatan daerah.
- 7) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terkait dengan proses penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, dan restitusi pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.
- 9) Mengusulkan rencana anggaran kegiatan tahunan.
- 10) Mengusulkan rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 11) Melaksanakan pelaporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- 12) Melaksanakan urusan ketatusahaan UPT.
- 13) Melaksanakan kegiatan layanan unggulan SAMSAT sesuai kebijakan yang ditetapkan.
- 14) Melaksanakan pengawasan internal UPT.

15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2) Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari kegiatan bawahan.

4) Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas.

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Membuat SOP terkait dengan bidang tugasnya.

7) Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan tugas setiap tahun.

8) Melakukan urusan administrasi pemungutan pajak.

9) Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan dokumen administrasi pemungutan pajak.

10) Melakukan penatausahaan barang dan asset daerah.

11) Mengkoordinir laporan rekapitulasi pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan, dan laporan lainnya.

12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian

1) Melaksanakan administrasi kepegawaian terkait ASN yang memasuki masa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penerima satyalancana karya, KP4 dan sasaran kerja pegawai.

2) Melaksanakan administrasi umum terkait agenda surat masuk dan surat keluar, penomoran nota pesanan, SPPD dan surat tugas.

3) Membuat daftar hadir dan rekapitulasi absensi pegawai.

4) Membuat daftar kebutuhan barang pakai habis/inventaris kantor.

5) Membuat kartu inventaris ruangan pada UPT Pendapatan.

6) Memantau penerimaan barang pakai habis/inventaris kantor.

7) Mengendalikan pengeluaran barang pakai habis dan penggunaan barang inventaris kantor.

8) Mengevaluasi dan menyusun laporan penggunaan barang pakai habis kantor (sisa stok barang) secara berkala.

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Penata Laporan Keuangan

- 1) Membuat kwitansi belanja pengeluaran.
- 2) Membuat nota pesanan barang/jasa.
- 3) Membuat berita acara penerimaan barang/jasa.
- 4) Membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa.
- 5) Membuat surat setoran pajak (SSP).
- 6) Membuat SPPD dalam daerah.
- 7) Membuat daftar pengeluaran ril.
- 8) Membuat rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- 9) Membuat rincian pertanggung jawaban per bulan.
- 10) Membuat laporan bulanan realisasi belanja.
- 11) Membuat buku kas umum.
- 12) Membuat buku pembantu pajak.
- 13) Membuat buku pembantu panjar.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan

- 1) Membuat surat tanda setoran PKB local.
- 2) Membuat surat setoran PKB link.
- 3) Mencatat buku kas umum penerimaan.
- 4) Membuat laporan realisasi penerimaan PKB.
- 5) Membuat laporan realisasi penerimaan BBN-KB.

- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan penetapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari kegiatan bawahan.
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Membuat SOP terkait dengan bidang tugasnya.
- 7) Membuat rencana kerja dan jadwal (*time schedule*) pelaksanaan tugas setiap tahun.
- 8) Melakukan penyelenggaraan kegiatan perhitungan, penelitian, verifikasi, dan penetapan pajak daerah serta pendapatan lainnya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 9) Menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak.
- 10) Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan kelancaran sistem pengelolaan dalam elektronik.
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan layanan unggulan SAMSAT.

12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan penetapan pajak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Pengadministrasi Pajak (petugas gerai Samsat)

1) Membuat laporan pemakaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2) Melakukan penetapan jumlah pajak kendaraan bermotor berdasarkan *merk/type*, jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.

3) Mencetak *notice* bayangan.

4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan (operator system (OPSYS))

1) Membuat laporan unit kendaraan terdaftar dan terbayar.

2) Membuat laporan unit kendaraan BBN-KB.

3) Membuat laporan nilai rupiah kendaraan BBN-KB.

4) Membuat laporan jumlah penetapan dan nilai pembayaran PKB dan BBN-KB.

5) Membuat laporan data kendaraan tiga instansi (Dispenda, POLRI, dan Jasa Raharja).

6) Membuat laporan data kendaraan link.

7) Membuat laporan data potensi kendaraan.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Perpajakan

- 1) Membuat laporan pemakaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 2) Melakukan penetapan jumlah pajak kendaraan bermotor berdasarkan *merk/type*, jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- 3) Mencetak *notice* bayangan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi pendataan dan penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Membuat SOP terkait dengan bidang tugasnya.
- 7) Membuat rencana kerja dan jadwal (*time schedule*) pelaksanaan tugas setiap tahun.
- 8) Melakukan pendataan dan penagihan pajak daerah.

- 9) Menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak.
- 10) Menyampaikan surat tagihan dan surat teguran pajak daerah kepada wajib pajak yang tidak memnuhi kewajiban tepat waktu.
- 11) Memberikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.
- 12) Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- 13) Membuat laporan pelaksanaan pendataan dan penagihan setiap bulannya.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendataan dan penagihan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak

- 1) Mencetak surat ketetapan pajak daerah.
- 2) Mencetak laporan realisasi penerimaan PKB.
- 3) Mencetak laporan realisasi penerimaan BBN-KB.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Pengolah Data Penagihan Pajak

- 1) Melakukan pendataan pajak daerah.

- 2) Membuat surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak.
- 3) Membuat surat tagihan dan surat teguran pajak daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 4) Memberikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.
- 5) Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- 6) Membuat laporan pendataan setiap bulannya.
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pendataan.
- 8) Membuat laporan hasil tunggakan pajak.
- 9) Melaksanakan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor.
- 10) Membuat laporan hasil kegiatan penerbitan pajak kendaraan bermotor.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Pengolahan Data Penagihan Pajak

- 1) Melakukan penagihan pajak daerah.
- 2) Membuat surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak.
- 3) Membuat surat tagihan dan surat teguran pajak daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 4) Memberikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.
- 5) Melaksanakan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor.

- 6) Melakukan penagihan pajak air permukaan.
- 7) Membuat laporan penagihan pajak setiap bulannya.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2 Deskriptif Data

Data penelitian yang digunakan adalah data berupa bukti target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode 2014 sampai dengan periode 2017.

4.2.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di Takalar

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor		Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor		(%)
	Rp		Rp		
2014	Rp	14.311.859.000	Rp	13.788.294.152	96,34
2015	Rp	14.600.530.000	Rp	15.870.360.970	108,69
2016	Rp	17.788.940.000	Rp	18.198.767.320	102,30
2017	Rp	19.896.400.000	Rp	20.023.233.294	100,63
		Rata-Rata			101,99

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018 (diolah kembali)

Dari tabel diatas tampak jelas bahwa penerimaan yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Takalar tahun 2014 hanya terealisasi sebesar Rp 13.788.294.152 dibawah perencanaan sebesar Rp 14.311.859.000 yang artinya adalah Bapenda Pendapatan Daerah Takalar tidak mencapai rencana yang ditargetkan dengan persentase 96,34%.

Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Takalar merencanakan penerimaan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 14.600.530.000 dan terealisasi sebesar Rp 15.870.360.970 dengan persentase 108,69% yang artinya penerimaan yang diperoleh melebihi target yang telah direncanakan.

Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Takalar merencanakan penerimaan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 17.788.940.000 dan terealisasi sebesar Rp 18.198.767.320 dengan persentase 102,30% yang artinya penerimaan yang diperoleh melebihi target yang telah direncanakan.

Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Takalar merencanakan penerimaan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 19.896.400.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.023.233.294 dengan persentase 100,63% yang artinya penerimaan yang diperoleh melebihi target yang telah direncanakan.

Setelah melakukan perhitungan diatas maka, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi PKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{13.788.294.152}{34.322.383.927} \times 100\% \\ &= 0,40\end{aligned}$$

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi PKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{15.870.360.970}{36.213.346.547} \times 100\% \\ &= 0,43\end{aligned}$$

3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi PKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{18.198.767.320}{39.974.616.011} \times 100\% \\ &= 0,45\end{aligned}$$

4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi PKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{20.023.233.294}{41.054.208.113} \times 100\% \\ &= 0,48\end{aligned}$$

4.2.2 Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor selama tahun 2014-2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Takalar

Tahun	Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (%)		
	Rp		Rp		
2014	Rp	21.099.750.000	Rp	19.992.967.125	94,75
2015	Rp	20.595.500.000	Rp	19.560.332.000	94,97
2016	Rp	21.077.500.000	Rp	21.109.563.000	100,15
2017	Rp	20.651.000.000	Rp	20.038.889.000	97,03
Rata-Rata					96,72

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018 (diolah kembali)

Dari tabel diatas tampak jelas bahwa penerimaan yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Takalar tahun 2014 hanya terealisasi sebesar Rp 19.992.967.125 dibawah perencanaan sebesar Rp 21.099.750.000 yang artinya adalah Bapenda Pendapatan Daerah Takalar tidak mencapai rencana yang ditargetkan dengan persentase 94,75%.

Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Takalar merencanakan penerimaan yang diperoleh dari bea balik nama sebesar Rp 20.595.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 19.560.332.000 dengan persentase 94,97% yang artinya penerimaan yang diperoleh masih dibawah target yang telah direncanakan.

Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Takalar merencanakan penerimaan yang diperoleh dari bea balik nama sebesar Rp 21.077.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 21.109.563.000 dengan persentase 100,15% yang artinya penerimaan yang diperoleh melebihi target yang telah direncanakan.

Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Takalar merencanakan penerimaan yang diperoleh dari bea balik nama sebesar Rp 20.651.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.038.889.000 dengan persentase 97,03% yang artinya penerimaan yang diperoleh masih dibawah target yang telah direncanakan.

Setelah melakukan perhitungan diatas maka, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi BBNKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBN-KB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{19.992.967.125}{34.322.383.927} \times 100\% \\ &= 0,58 \end{aligned}$$

2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi BBNKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBN-KB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{19.560.332.000}{36.213.346.547} \times 100\% \\ &= 0,54 \end{aligned}$$

3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi BBNKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBN-KB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{21.109.563.000}{39.974.616.011} \times 100\% \\ &= 0,52 \end{aligned}$$

4. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi BBNKB Terhadap PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBN-KB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{20.038.889.000}{41.054.208.113} \times 100\% \\ &= 0,48 \end{aligned}$$

4.2.3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Untuk mengetahui perkembangan pemungutan penerimaan pendapatan asli daerah di takalar selama 4 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dapat dilihat di tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Takalar

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah		Realisasi Pendapatan Asli Daerah		Realisasi (%)
	Rp		Rp		
2014	Rp	35.815.759.000	Rp	34.322.383.927	95,83
2015	Rp	35.762.030.000	Rp	36.213.346.547	101,26
2016	Rp	39.677.897.500	Rp	39.974.616.011	100,74
2017	Rp	41.481.658.408	Rp	41.054.208.113	98,96
Rata-Rata					99,20

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018 (diolah kembali)

Dari tabel diatas tampak jelas bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2017 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 101,26% atau dapat dikatakan bahwa target sebesar Rp 35.762.030 realisasi sebesar Rp 36.213.346.547 perbandingan target dan realisasi rata-rata mencapai 99,20% pertahun.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian apakah terdapat penyimpangan asumsi

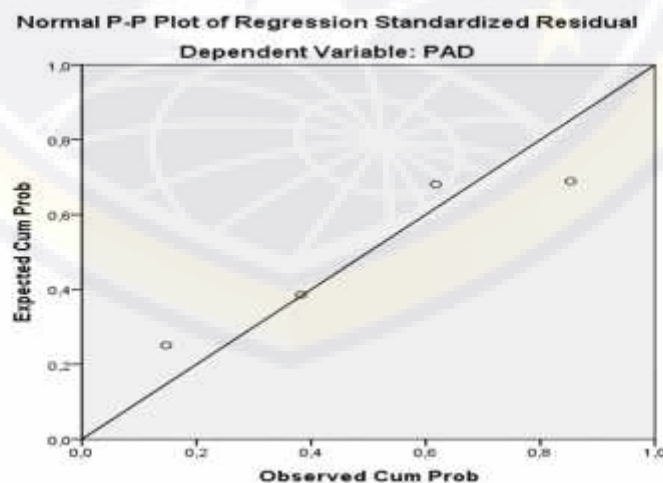
klasik yaitu melalui pengujian normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas diuji dengan menggunakan uji normalitas *Probability Plot*. Dalam uji ini, normalitas dilakukan pada nilai residual yang normal. Pendeteksian kenormalan nilai residual ini dilakukan dengan melihat titik-titik plot hasil dari output SPSS dan melihat apakah titik-titik tersebut berada disekitar garis diagonalnya atau tidak. Sebaliknya jika titik-titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal maka dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas *Probability Plot*:

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan uji normalitas pada tampilan grafik dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas yang dimana data atau titik menyebar disekitar garis diagonal. Hal ini berarti nilai residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tingkat signifikan diatas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika sebaliknya dibawah 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,412	,118		3,506	,177
	Pajak Kendaraan Bermotor	,000	,001	-,042	-,144	,909
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-,017	,005	-,947	-3,263	,189

a. Dependent Variable: AbsUt

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini uji autokorelasi diuji dengan menggunakan uji *Run Test*. *Run Test* sebagian dari statistik non-parametik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Data dikatakan terdapat gejala autokorelasi jika nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya jika nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandard ized Residual
Test Value ^a	,00034
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	2
Total Cases	4
Number of Runs	3
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* sebesar $1,000 >$ dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Sehingga regresi linear dapat dilanjutkan.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *tolerance* dan VIF. Yang dimana jika nilai *tolerance* lebih besar dari $0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai VIF lebih kecil dari $10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,151	1,620		1,945	,302		
	Pajak Kendaraan Bermotor	,478	,014	,927	33,219	,019	,856	1,168
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	,420	,072	,162	5,796	,109	,856	1,168

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa berdasarkan nilai *tolerance* pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diperoleh sebesar $0,856$ lebih besar dari $0,10$ yang artinya tidak terjadi

multikolinearitas dan nilai VIF pada pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor diperoleh sebesar 1,168 lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.2 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan SPSS, maka hasil regresi disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,151	1,620		1,945	,302
	Pajak Kendaraan Bermotor	,478	,014	,927	33,219	,019
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	,420	,072	,162	5,796	,109

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.7 diatas dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan X_1 , X_2 , dan Y yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah = $3,151 + 0,478 \text{ PKB} + 0,420 \text{ BBNKB} + \text{error}$

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (PAD) memiliki nilai positif sebesar 3,151. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bernilai konstan atau nol, pendapatan asli daerah akan bernilai positif sebesar 3,151.
2. Nilai koefisien (X1) sebesar 0,478. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang artinya jika pajak kendaraan bermotor bertambah sebesar 1 satuan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,478.
3. Nilai koefisien (X2) sebesar 0,420. Hal ini menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang artinya jika bea balik nama kendaraan bermotor bertambah sebesar 1 satuan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,420.

4.3.3 Uji t

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing t hitung. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Pengujian statistik uji t

dapat dilihat pada tabel 4.8 dan hasil pengujian dari uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,019. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,019 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 33,219 > t_{tabel} 12,7$. Sehingga dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,109. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,109 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,796 < t_{tabel} 12,7$ dengan demikian H2 ditolak. Hal ini berarti bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual-beli kendaraan bekas tidak mengganti bea balik nama kendaraan bermotor.

4.3.4 Uji Simultan Uji Simultan (uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikan <

0,05, atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$, atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel Anova sebagai berikut:

Tabel 4.8

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,021	2	,011	749,297	,026 ^b
	Residual	,000	1	,000		
	Total	,021	3			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan output hasil uji F pada tabel 4.8 diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar $0,026 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 749,297 > F_{tabel} 19,0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

4.3.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Koefisien determinasi akan

menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variabel yang lain. Nilai koefisien ini antar 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji koefisien determinasi R^2 .

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	,999	,998	,00375

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Kendaraan

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R *square* sebesar 0,998 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 99,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,02%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Takalar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 21, maka perhitungan uji t dihasilkan nilai $t_{hitung} 33,219 > t_{tabel} 12,7$. Hal ini berarti dapat disimpulkan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar dari tahun 2014-2017, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Takalar setiap tahunnya.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar pada tahun 2014-2017. Hal ini dikarenakan perhitungan uji t yang dihasilkan $t_{hitung} 5,796 < t_{tabel} 12,7$, karena sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual-beli motor bekas tidak mengganti bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar pada tahun 2014-2017, dengan perhitungan uji F yang dihasilkan $F_{hitung} 749,297 > F_{tabel} 19,0$ maka secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

1. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Takalar memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki system administrasi yang ada.
2. Meskipun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pemerintah masih perlu meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala, dan memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, serta pembahasan mengenai pajak daerah yang hanya fokus pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor . oleh sebab itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara lebih luas tentang pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi. 2013. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman, dan Christina Yunita. 2015. *Pengaruh Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal. Palembang: STIE MPD.
- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Diah Elvina. 2017. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta. Rajawali Pers.
- H. Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat, dan Anneke Wangkar. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (studi kasus pada samsat Airmadidi)*. Jurnal Berkala Efisiensi Vol 15 No. 03. Universitas Sam Ratulangi.
- Rakatitha, Putu Nadya Kardevi, dan Gayatri. 2017. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi Vo 21.2. Universitas Udayana.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang. Empatdua Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Website: www.hukumonline.com (Diakses: 10 Maret 2018)

The logo of Universitas Djuanda is a shield-shaped emblem. At the top, it features a graduation cap and a golden sheaf of wheat. Below this, a dark banner contains the word "UNIVERSITAS" in white capital letters. The lower portion of the shield depicts a white sailboat on the left and three yellow stars on the right, all set against a background of a globe's grid lines. A red ribbon banner with the word "DUJUNDA" in white capital letters is draped across the middle of the shield. The entire logo is rendered in a light, semi-transparent style.

LAMPIRAN

**REALISASI DAN TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR
BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN	JUMLAH	JUMLAH	TARGET PKB	REALISASI PKB
	MOTOR	MOBIL		
2014	35.635	4.307	Rp 14.311.859.000	Rp 13.788.294.152
2015	36.980	5.105	Rp 14.600.530.000	Rp 15.870.360.970
2016	37.039	5.959	Rp 17.788.940.000	Rp 18.198.767.320
2017	37.182	6.569	Rp 19.896.400.000	Rp 20.023.233.294

BEA BALIK NAMA

TAHUN	TARGET BBNKB	REALISASI BBNKB
2014	Rp 21.099.750.000	Rp 19.992.967.125
2015	Rp 20.595.500.000	Rp 19.560.332.000
2016	Rp 21.077.500.000	Rp 21.109.563.000
2017	Rp 20.651.000.000	Rp 20.038.889.000

PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD
2014	Rp 35.815.759.000	Rp 34.322.383.927
2015	Rp 35.762.030.000	Rp 36.213.346.547
2016	Rp 39.677.897.500	Rp 39.974.616.011
2017	Rp 41.481.658.408	Rp 41.054.208.113

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT VAR00003
/METHOD=ENTER VAR00001 VAR00002.

```

Regression

[DataSet0]

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	,999	,998	,00375

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama, Pajak Kendaraan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,021	2	,011	749,297	,026 ^b
	Residual	,000	1	,000		
	Total	,021	3			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama, Pajak Kendaraan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,151	1,620		1,945	,302
Pajak Kendaraan	,478	,014	,927	33,219	,019
Bea Balik Nama	,420	,072	,162	5,796	,109

a. Dependent Variable: PAD

Descriptives

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Kendaraan	4	23,35	23,72	23,5449	,16276
Bea Balik Nama	4	23,70	23,77	23,7273	,03233
PAD	4	24,26	24,44	24,3554	,08387
Valid N (listwise)	4				

Regression

[DataSet0]

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	,999	,998	,00375	2,082

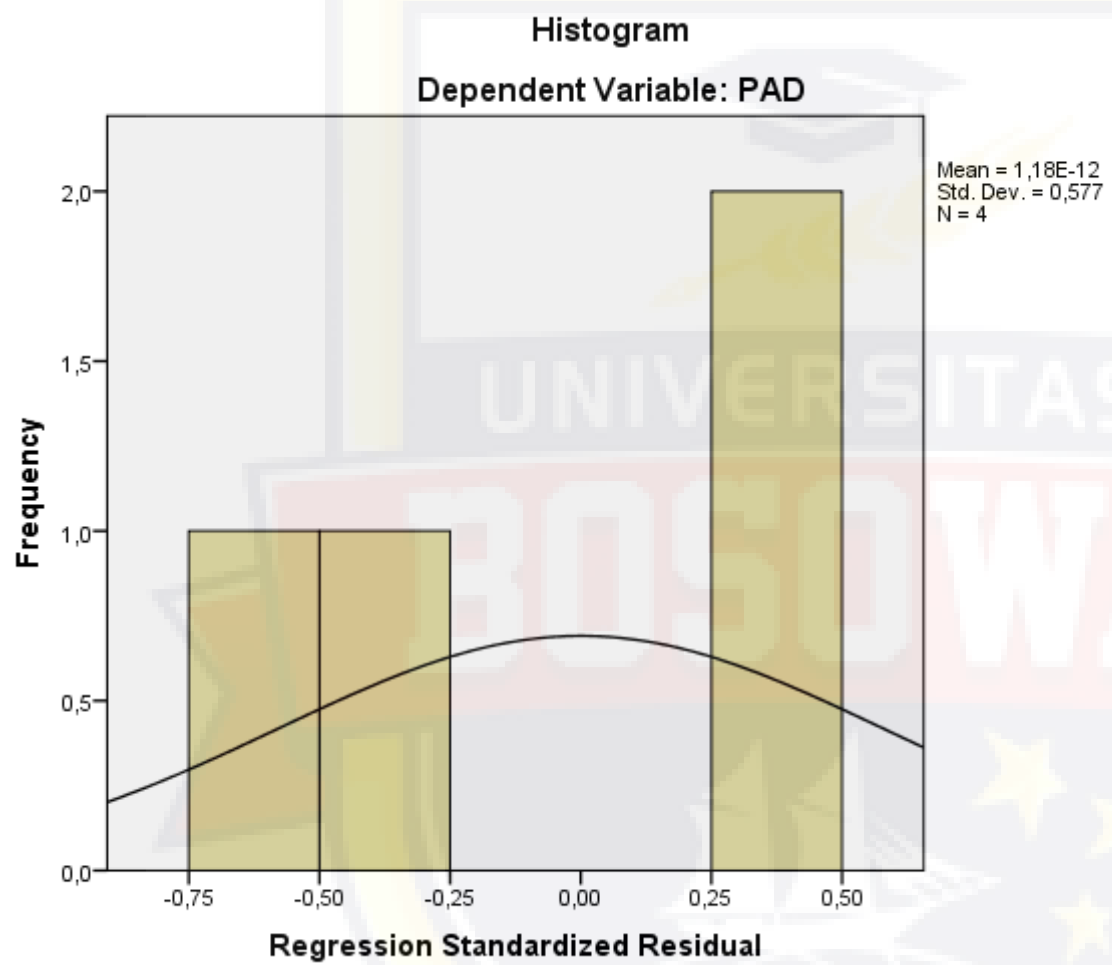
a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama, Pajak Kendaraan

b. Dependent Variable: PAD

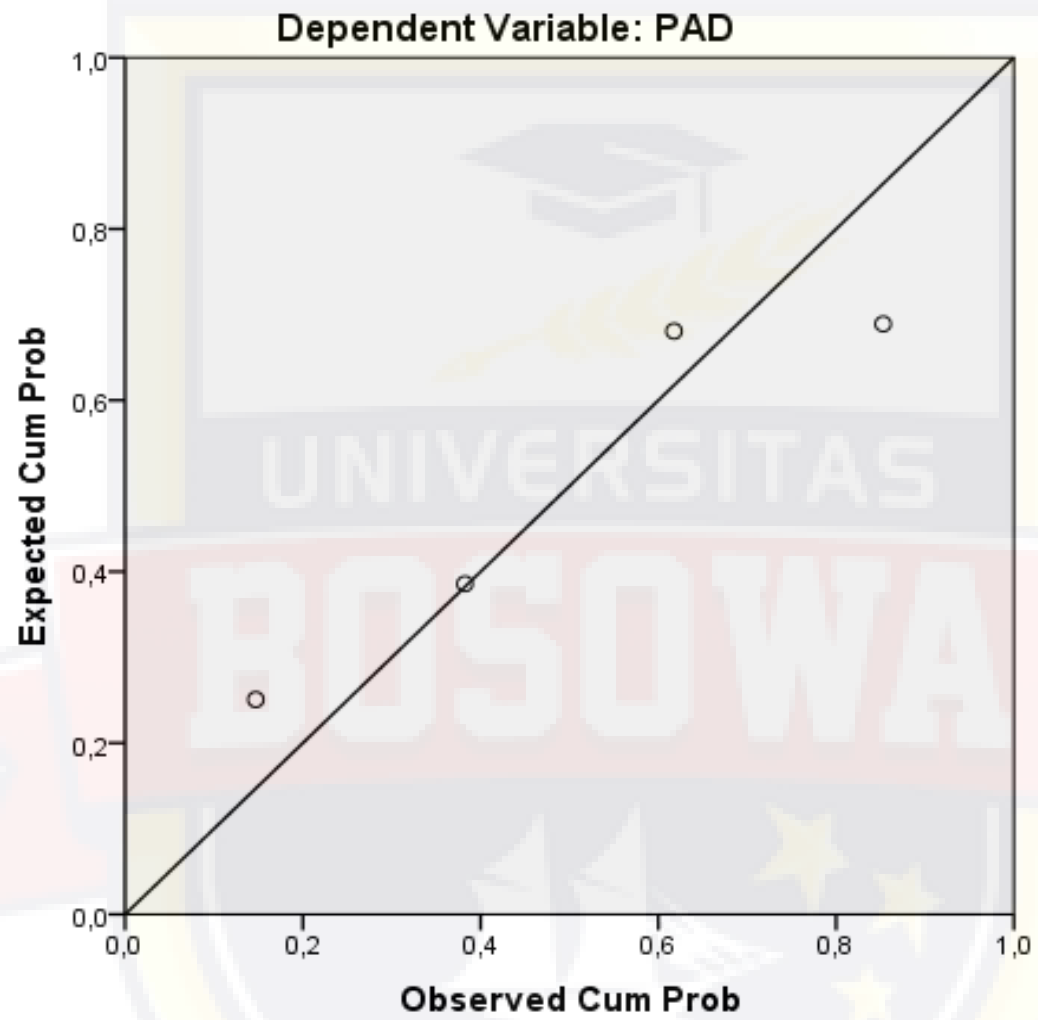
Coefficients^a

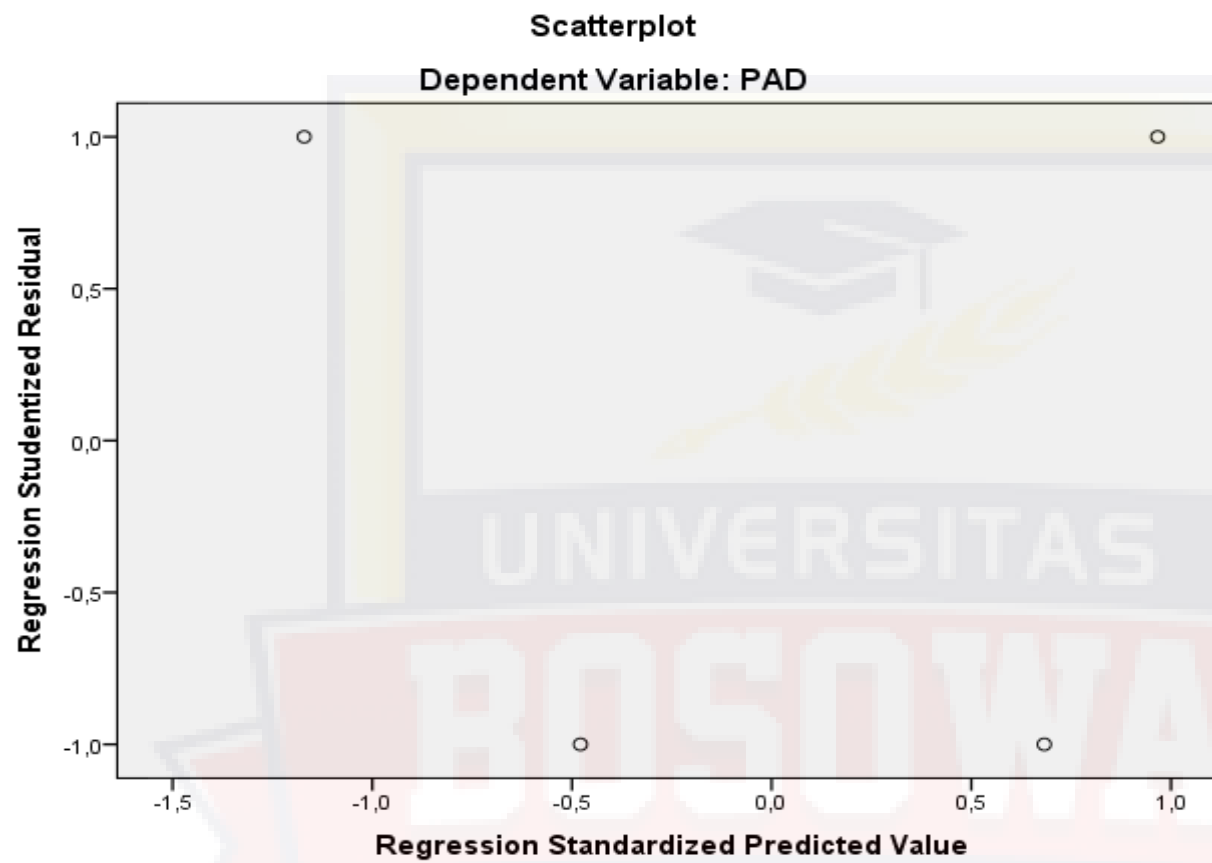
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Kendaraan	,856	1,168
	Bea Balik Nama	,856	1,168

a. Dependent Variable: PAD



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		4
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00216578
Most Extreme Differences	Absolute	,292
	Positive	,196
	Negative	-,292
Kolmogorov-Smirnov Z		,584
Asymp. Sig. (2-tailed)		,885

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00034
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	2
Total Cases	4
Number of Runs	3
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

UJI GLEJSER

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,412	,118		3,506	,177
	Pajak Kendaraan	,000	,001	-,042	-,144	,909
	Bea Balik Nama	-,017	,005	-,947	-3,263	,189

a. Dependent Variable: AbsUt

t Table

cum. prob one-tail two-tails	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
Z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										

Titik Persentase Distribusi F

Probabilita = 0.05

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

BOSOWA



Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71